

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Prajitno Andi, Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa PPAT, Perwira Media Nusantara, Surabaya, 2017
- Mamminanga Andi, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008
- Harsono Budi, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya Edisi 2011, Djambatan, Jakarta, 2011
- Harsono Boedi, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Ed.rev.,cet. 19, (Jakarta: Djambatan)2002
- Koentjoro Diana Halim, Hukum Administrasi Negara, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004
- Pieris John, Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat),Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi ManusiaRI,Jakarta, 2008
- Utrecht E., Pengantar Hukum Administrasi Negara, Ichtiar Baru, Jakarta, 1985
- Ridwan Juniarso & Ahmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrsi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa, Bandung, 2009
- Ibrahim Johny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum, Bayu Media, Surabaya, 2005

- Suryono Leli Joko, *Asas Keadilan Pada Kontrak di Bidang Hubungan Industrial*,  
Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2011
- Tedjosaputro Liliana, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*,  
Bayu Grafika, Yogyakarta, 1995
- Tedjosaputro Liliana, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*,  
Biagraf Pubslishing, Yogyakarta, 1994
- Muhammad Abduh yang mengutip pendapat Mr. Crossman (Inggris), *Modul  
Kumpulan Bahan Kuliah S2 Ilmu Hukum, Konsentrasi HAN, Capita Selecta  
dan Perbandingan Hukum Administrasi Negara, Program Studi Ilmu Hukum  
Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003.*
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta, 2008
- Mulyoto., *Legal Standing*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2016.
- Yudara N.G., *Pokok-Pokok Pikiran Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris  
Menurut Sistem Hukum di Indonesia, Majelis Kehormatan Ikatan Notaris  
Indonesia, Jawa Timur, 2005*
- Basuki Kunthoro dan Retno Supartinah, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty,  
Yogyakarta, 1984
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,  
1997
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum dan Keperannya*, Badan  
Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001
- Siswati Sri, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta, PT. RajaGrafindoPersada:2013)

- Prasetyo Teguh, "Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia", dalam  
Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum Edisi Oktober 2010
- Prasetya Teguh, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2011
- Adji Oemar Seno, Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum, Simposium UI  
Jakarta, 1966
- R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya : Usaha Nasional, 1981
- Prayitno Roesnastiti, Kode Etik Notaris, Jakarta, 2020
- Lamintang P.A.F. & Theo Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Sinar  
Grafika, Jakarta, 2012
- Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta,  
1976
- Salim, HS., Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tana, Raja Grafindo  
Persada, Jakarta, 2016
- Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Ed.1-  
Cet.1, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016
- Sayekti Sri, Hukum Agraria Nasional, (Bandar Lampung : Universitas Lampung,  
2000)
- Siswati Sri, Etika dan Hukum Kesehatan, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada: 2013)
- Soegeng Santosa dkk. 2005. *Aspek Pidana dalam Pelaksanaan Tugas Notaris*,  
Renvoi No. 22, Maret, th, 02
- Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, (selanjutnya disebut  
Subekti VI), 1969
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. 29, Intermasa, Jakarta, 2001

Suseno Sigit, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Di Dalam Dan Di Luar Kuhp (Suatu Analisis)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2012

Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama- 2003

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah

Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

## **C. ARTIKEL**

Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durachman, Msc., MT. Etika Bisnis & Hak Kekayaan Intelektual, Lembaga Penelitian UIN Jakarta "<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c1194/arti-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan>, 5 juli 2021, pukul 08.24 wib"

Tri Jata Ayu Pramesti, Arti Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (On-line),

tersedia di WWW :  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c1194/arti-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan>, (5 juli 2021).

#### **D. Wawancara**

Ayi Ruhiat, S.H., Wawancara, Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Provinsi Lampung, Wawancara Dengan Penulis, Kantor IPPAT, Bandar Lampung, 29 Juni 2021

Iptu Edwin, S.H., M.H., Wawancara, KANIT VI di bagian HARDA Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung, Wawancara dengan penulis, Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung, 24 Juni 2021

Ipda Eko Prasetyo, Wawancara, Penyidik di bagian HARDA Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung, Wawancara dengan penulis, Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung, 24 Juni 2021

Bripka Suryadi, Wawancara, Penyidik di bagian HARDA Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung, Wawancara dengan penulis, Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung, 24 Juni 2021